

## Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

### *Government Performance Accountability : Analysis Of The Inleuncing Factors*

Tria Novrianti<sup>1</sup>, Helvoni Mahrina<sup>2</sup>, Helmi Herawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

[tnovrianti50@gmail.com](mailto:tnovrianti50@gmail.com)

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran “anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas” kinerja pemerintah. Penelitian ini dilakukan di BPKAD Kota Bengkulu. “Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor BPKAD Kota Bengkulu yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sekretariat, bagian anggaran, bidang akuntansi dan perbendaharaan, aset, security dan cleaning service. dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling “dengan 54 responden yaitu bagian anggaran, Bidang aset , dan akuntansi” dan bagian treasury. Metode pengumpulan data adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala likert. Analisis pengaruh variabel menggunakan metode analisis regresi linier berganda Statistical Packages For Social Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran “anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif” terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas Kinerja Pemerintah., Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of clarity on the target of “budget, accounting control, and reporting system on accountability” of government performance. This research was conducted at BPKAD Bengkulu City. “This research is a research with a quantitative approach. The data used is primary data. Respondents in this study were all “employees at the Bengkulu City BPKAD office who were directly involved in “local financial management, namely, the secretariat, the budget department, the field of “accounting and treasury, asset, security and cleaning services. “Sampling in this study uses purposive sampling method “with 54 respondents, namely the budget, asset midwives, and accounting” and the treasury. The data collection method is a survey by using a questionnaire that is distributed to respondents. Measurement scale “data with a Likert scale. Analysis of the influence of variables using the “multiple linear regression analysis Statistical Packages For Social Science (SPSS) method. The results of this study indicate that the effect of clarity on targets “budget, accounting control, and reporting system has a significant and positive effect” on government performance accountability.*

**Keywords :** *Accountability of Government Performance, Clarity of Budget Targets, Accounting Control, Reporting System*

#### PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*Institutional Reform*) dan reformasi manajemen publik (*Public Management Reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah didaerah baik struktur maupun instrukturinya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan

terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018:26). Menurut Auditya dan Husaini (2013:14) menyatakan bahwa tuntutan atas kinerja yang lebih baik dari masyarakat ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan.

Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik, apabila telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mardiasmo (2018:12) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggung jawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja yang baik juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan sistem pengendalian internalnya.

Anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program pembangunan Daerah (Properda). Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, serta dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah di masa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestone*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai (Emilia, dkk 2013:21). Kejelasan sasaran anggaran juga tidak bisa lepas dari sistem pengendalian yang menggunakan informasi berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi.

Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi (Kusumaningrum, 2010:12). Proses pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, juga berhubungan dengan sistem pelaporan yang baik untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Hidayattullah dan Herdjino (2015:20) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Pemerintah Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang ada di provinsi Bengkulu yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa

keuangan (BPK) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh predikat tersebut dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk kedua kalinya secara berturut-turut (<http://bengkulu.bpk.go.id> 2020). Predikat badan pemeriksa (BPK) ini menjadi tolak ukur untuk mengukur apakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu telah memenuhi standar. Publik mempersepsi bahwa opini WTP mencerminkan penggunaan keuangan yang benar, padahal berulang kali BPK mengingatkan bahwa lembaga yang mendapat opini WTP tidaklah dijamin bebas dari korupsi. Opini WTP hanya sekedar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan tiap-tiap lembaga. Namun masih banyak daerah yang sudah meraih opini WTP tetapi banyak di temukan masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di kutip dalam (<http://www.cnbcindonesia.com>, 2020) oleh karena itu peneliti mengambil objek pada kantor BPKAD Kota Bengkulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu ?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Anggaran**

Menurut Mardiasmo (2018:75), penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Bastian (2010:191), mendefinisikan bahwa "Anggaran (*budget*) dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang".

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran, dimana setiap manajer dalam organisasi diberi peran untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/ APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Yulianti dkk, 2014:16). Menurut Kenis dalam Kurnis (2004) indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah Jelas, Spesifik, Mengerti.

### Pengendalian Akuntansi

Hidayatullah dan Herdjiono (2015:21) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan suatu informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktifitas organisasi. Cakupan pengendalian akuntansi menurut John Wiley dan Sons, Inc (1995:102) adalah sebagai berikut:

1. Semua aspek transaksi keuangan, pembayaran dan penerimaan kas, arus dana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah.
2. Pengendalian piutang
3. Perencanaan dan pengendalian persediaan.

### Sistem Pelaporan

Zakiyudin dan Suyanto (2015:34), menyatakan bahwa sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, objektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP: 2000), indikator yang digunakan dalam sistem pelaporan adalah:

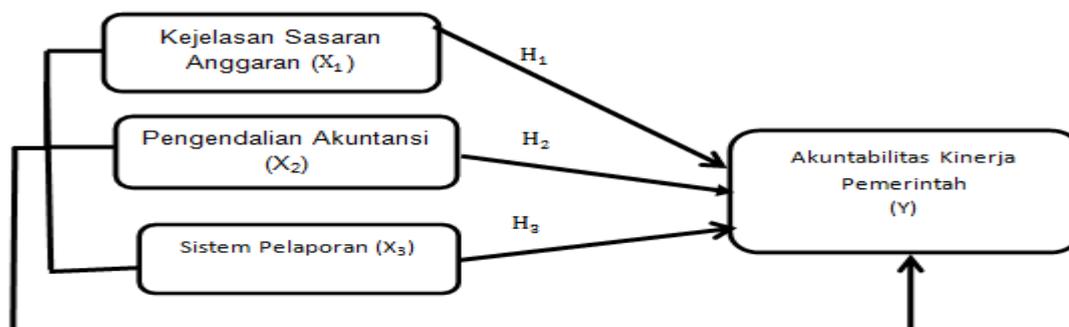
- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi.

### Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003):

1. Berdasarkan suatu sistem
2. Pencapaian visi dan misi
3. Jujur, objektif dan transparan
4. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka pemikiran

### Hipotesis

H<sub>1</sub> : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di Kota Bengkulu

H<sub>2</sub> : Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di Kota Bengkulu.

H<sub>3</sub> : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di Kota Bengkulu

## METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi. Menurut Sugiyono (2018:107), metode penelitian eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang menjelaskan posisi variabel - variabel yang diteliti dalam sebuah penelitian. Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif adalah data penelitian yang berlandaskan pada filsafat potivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk mengukur serta mendapatkan hasil penelitian melalui kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa data yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada karyawan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

Pada penelitian ini yang digunakan yaitu data primer, berupa jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada karyawan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Bengkulu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berkaitan langsung dengan keuangan yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Bengkulu yaitu bidang anggaran, aset dan bidang akuntansi perbendaharaan sebanyak 54 orang karyawan. Kriteria sampel yang akan digunakan oleh penulis yaitu: Pegawai dalam bidang yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan di instansi, Sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh setiap variabel independen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi lapangan. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data langsung dari sumber peneliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode kuesioner. Untuk mengukur setiap jawaban yang diberikan kepada responden digunakan skala likert. Skala likert dengan urutan skala lima yaitu, 1,2,3,4,5 dan mempunyai kriteria jawaban sebagai berikut.

Tabel 1 Skala Likert

Kriteria	Keterangan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Ragu-Ragu	RR	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber :Sugiyono, 2018

## Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sarjono (2011:91), analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Rumus yang digunakan dalam analisis regresi untuk 3 variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)

$\alpha$  = Konstanta Regresi

$\beta_1$  = Koefisien Regresi variabel  $X_1$

$\beta_2$  = Koefisien Regresi variabel  $X_2$

$\beta_3$  = Koefisien Regresi variabel  $X_3$

$X_1$  = Variabel independen pertama (Kejelasan Sasaran Anggaran)

$X_2$  = Variabel independen kedua (Pengendalian Akuntansi)

$X_3$  = Variabel independen ketiga (Sistem Pelaporan)

e = error

Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Variabel bebas atau *independent variabel*( $X_1$ )

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab. Adapun indikator kejelasan sasaran anggaran yaitu, jelas, spesifik, dan dimengerti (Kennis, 2004:54).

2. Variabel bebas atau *independent variable* ( $X_2$ )

Pengendalian akuntansi adalah mencakup semua aspek dari transaksi – transaksi keuangan, seperti pembayaran kas, arus dana, investasi yang bijaksana, dan pengamanan dari penggunaan tidak sah. Adapun indikator pengendalian akuntansi yaitu, transaksi keuangan, pengendalian piutang, perencanaan dan pengendalian persediaan (John WILEY dan Sons, Inc 1995:102).

3. Variabel bebas atau *independent variable* ( $X_3$ )

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Adapun indikator system pelaporan yaitu, akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP:2000).

4. Variabel terikat atau *dependent variable*( $Y$ )

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala (Mardiasmo, 2018:38). Adapun indikator akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu, berdasarkan suatu sistem, pencapaian visi dan misi, jujur, objektif, transparan, dan menyajikan keberhasilan atau kegagalan (LAN:2003).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Sesuai dengan pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bengkulu memiliki karyawan yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan untuk melaksanakan kewajiban dan tugas-tugasnya.

1. Sekretariat

Tugasnya adalah menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat, memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, dan menyusun rumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Bidang Anggaran

Tugasnya adalah menyusun rencana, program dan kegiatan bidang anggaran, memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, menyusun kebijakan teknis di bidang anggaran.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Tugasnya adalah menyusun rencana, program dan kegiatan bidang akuntansi dan perbendaharaan, memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan.

#### 4. Bidang Aset

Tugasnya adalah menyusun rencana, program dan kegiatan bidang pengelolaan aset, memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya, menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset.

#### **Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bengkulu**

##### 1. Visi BPKAD Pemerintah Kota Bengkulu

Mewujudkan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, akuntabel, responsif, partisipatif dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian demi mewujudkan Kota Bengkulu yang bahagia dan religius.

##### 2. Misi BPKAD Pemerintah Kota Bengkulu

- a. Mewujudkan peningkatan aqidah dan profesionalisme aparatur dalam rangka terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik dan religius.
- b. Terlaksananya tertib pengelolaan dan pencatatan aset untuk terwujudnya akuntabilitas inventarisasi Aset Daerah.
- c. Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset Daerah untuk terwujudnya pelayanan SKPD dan masyarakat yang cepat dan akurat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- d. Terlaksananya penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan APBD yang transparan, akuntabel dan partisipatif demi terwujudnya APBD yang efektif dan efisien serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Bengkulu (APBD untuk rakyat).

#### **Deskripsi Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berkerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bengkulu. Sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu *purposive sampling*, maka sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang berkaitan langsung dengan keuangan. Responden dalam penelitian ini adalah para karyawan di BPKAD yang membidangi, bidang anggaran, bidang aset, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan, yang memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu sebanyak 54 orang karyawan.

Tabel 2 Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Responden	
		Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	54	100 %
2	Kuesioner yang kembali	54	100 %
3	Kuesioner yang diolah	54	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2021

#### **Gambaran Umum Responden**

Dalam penelitian ini respondennya adalah karyawan yang berkerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bengkulu. Dari hasil data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden yang terdiri berdasarkan jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan.

#### **Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	
		Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	30	71%
2	Perempuan	24	29%
	Total	54	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

**Deskripsi Responden Berdasarkan Usia**

Tabel 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Responden	
		Jumlah	Persentase
1	20 - 29 Tahun	7	17%
2	30 - 39 Tahun	30	50%
3	Lebih dari 40 Tahun	17	33%
Total		54	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

**Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Tabel 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Responden	
		Jumlah	Persentase
1	D3	2	5%
2	S1	37	76%
3	S2	15	19%
Total		54	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

**Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.**

Tabel 6 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Responden	
		Jumlah	Persentase
1	1 – 5 Tahun	10	14%
2	6 – 10 Tahun	30	57%
3	10 – 15 Tahun	10	19%
4	16 – 20 Tahun	4	10%
Total		54	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

**Kualitas Data**

**Uji Validitas**

Kriteria uji validitas adalah jika tingkat signifikan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada nilai signifikan 0,05 maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid, sebaliknya item dikatakan tidak valid jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  pada nilai signifikan 0,05 maka nilai  $r_{tabel}$  dengan sig 0,05 adalah 0,268 (df = n-2 = 54-2 = 52). Berikut ini pembahasan uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

Pertanyaan	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	Keterangan
P1	0,533	0,268	Valid
P2	0,485	0,268	Valid
P3	0,655	0,268	Valid
P4	0,630	0,268	Valid
P5	0,350	0,268	Valid
P6	0,418	0,268	Valid
P7	0,398	0,268	Valid
P8	0,557	0,268	Valid
P9	0,481	0,268	Valid

Sumber: Peneliti, 2021

Tabel 8 Uji Validitas Pengendalian akuntansi

Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
P1	0,439	0,268	Valid
P2	0,517	0,268	Valid
P3	0,612	0,268	Valid
P4	0,673	0,268	Valid
P5	0,285	0,268	Valid
P6	0,279	0,268	Valid
P7	0,393	0,268	Valid
P8	0,517	0,268	Valid
P9	0,716	0,268	Valid

Sumber: *Peneliti, 2021*

Tabel 9 Uji Validitas Sistem Pelaporan

Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
P1	0,521	0,268	Valid
P2	0,558	0,268	Valid
P3	0,698	0,268	Valid
P4	0,708	0,268	Valid
P5	0,732	0,268	Valid
P6	0,679	0,268	Valid
P7	0,532	0,268	Valid
P8	0,607	0,628	Valid
P9	0,342	0,628	Valid

Sumber: *peneliti, 2021*

Tabel 10 Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
P1	0,360	0,268	Valid
P2	0,443	0,268	Valid
P3	0,700	0,268	Valid
P4	0,783	0,268	Valid
P5	0,678	0,268	Valid
P6	0,764	0,268	Valid
P7	0,702	0,268	Valid
P8	0,647	0,268	Valid
P9	0,347	0,268	Valid

Sumber: *Peneliti, 2021*

Dari hasil pengujian validitas pada Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ), Pengendalian Akuntansi ( $X_2$ ), Sistem Pelaporan ( $X_3$ ), Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) diketahui bahwa seluruh pernyataan, mempunyai nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,268), dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka seluruh pernyataan tersebut seluruhnya valid.

#### Uji Reliabilitas

Tingkat reliabilitas variabel dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpa. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$ .

Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Cronbach Alpha	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ )	0,623	$> 0,60$	Reliabel
Pengendalian Akuntansi ( $X_2$ )	0,624	$> 0,60$	Reliabel
Sistem Pelaporan ( $X_3$ )	0,774	$> 0,60$	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)	0.791	$> 0,60$	Reliabel

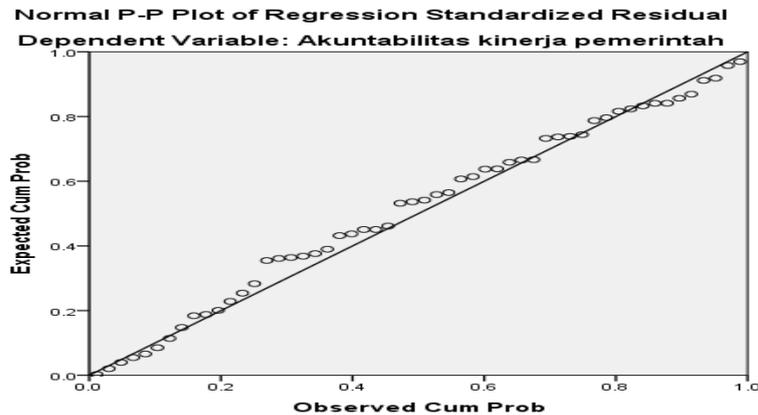
Sumber: *Peneliti, 2021*

Terlihat pada tabel diatas diketahui bahwa variabel mempunyai Koefisien reliabilitas yang > dari Cronbach Alpha yaitu 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mencari tahu regresi mempunyai distribusi normal seperti yang dijelaskan oleh gambar , berikut ini :



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Peneliti,2021

Berdasarkan dari gambar diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.

**Uji Multikolinearitas**

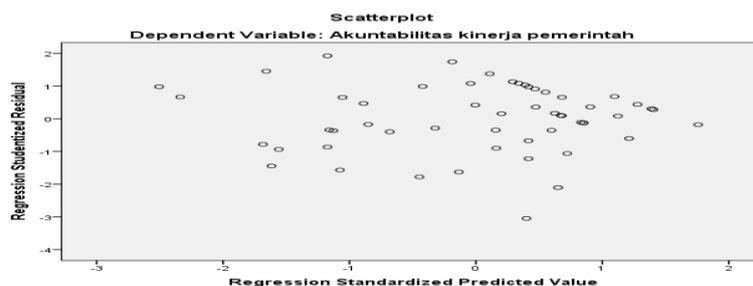
Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic				Keterangan
	Tolerance	Batas Tolerance	VIF	Batas VIF	
(Constan)					
X1	0,533	> 0,1	1,887	< 10	Tidak Multikolinieritas
X2	0,510	> 0,1	1,959	< 10	Tidak Multikolinieritas
X3	0,563	> 0,1	1,776	< 10	Tidak Multikolinieritas

Sumber: Peneliti, 2021

Dari hasil Tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance ketiga variabel yaitu X<sub>1</sub> (Kejelasan Sasaran Anggaran) = 0,533, X<sub>2</sub> (Pengendalian Akuntansi )= 0,510, dan X<sub>3</sub> (Sistem Pelaporan) = 0,563 lebih besar dari pada 0,1. Nilai VIF X<sub>1</sub> (Kejelasan Sasaran Anggaran) = 1,887, X<sub>2</sub> (Pengendalian Akuntansi) = 1,959, dan X<sub>3</sub> (Sistem Pelaporan) = 1,776, lebih kecil dari 10. Maka antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Peneliti,2021

Berdasarkan dari gambar diatas bahwa Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola

penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Understandardized coefficients		Standardized Coefficients
	B	std.error	Beta
(Constant)	1,084	4.546	
X1	0,288	0,122	0,279
X2	0,300	0,148	0,246
X3	0,408	0,120	0,392

Sumber: *Peneliti 2021*

Dari hasil penelitian regresi Linear berganda dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (2)$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)

$\alpha$  = Konstanta Regresi

$\beta_1$  = Koefisien Regresi variabel X1

$\beta_2$  = Koefisien Regresi variabel X2

$\beta_3$  = Koefisien Regresi variabel X3

X1 = Variabel independen pertama (Kejelasan Sasaran Anggaran)

X2 = Variabel independen kedua (Pengendalian Akuntansi)

X3 = Variabel independen ketiga (Sistem Pelaporan

e = error

$$Y = 1,084 + 0,288x_1 + 0,300x_2 + 0,408x_3 \quad (3)$$

Penjelasan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 1,084 mempunyai arti bahwa , X<sub>1</sub> (Kejelasan Sasaran Anggaran), X<sub>2</sub> (Pengendalian Akuntansi), X<sub>3</sub> (Sistem Pelaporan) sama dengan nol. Maka Y ( Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) akan tetap 1,084. Hal ini berlaku saat pelaksanaan penelitian yang berarti jika variabel bebas dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja Pemerintah adalah 1,084.
2. X<sub>1</sub> = 0,288 memiliki makna bahwa setiap variabel X<sub>1</sub> naik satu satuan, maka variabel Beta (Y) akan ikut naik sebesar 0,288.
3. X<sub>2</sub> = 0,300 memiliki makna bahwa setiap Variabel X<sub>2</sub> naik satu satuan, maka variabel Beta (Y) akan ikut naik sebesar 0,300.
4. X<sub>3</sub> = 0,408 memiliki makna bahwa setiap Variabel X<sub>3</sub> naik satu satuan, maka variabel Beta (Y) akan ikut naik sebesar 0.408.

### Uji Hipotesis

#### Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel independen (Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah). Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan membandingkan t<sub>tabel</sub> 2,008 dan signifikan 0,05.

Tabel 14 Hasil uji t (Parsial)

Model	Understandardized coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	std.error	Beta		
(Constant)	1,084	4.546	0,238		0,813
X1	0,288	0,122	0,279	2,351	0,023
X2	0,300	0,148	0,246	2,026	0,048
X3	0,408	0,120	0,392	3,397	0,001

Sumber: Peneliti, 2021

### 1. Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 2,351 > nilai tabel t sebesar 2,008 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df=n-k$ , yaitu  $54-4=50$ ) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,288 dan tingkat signifikansi 0,023 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_1$  diterima dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### 2. Pengujian Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Pengendalian akuntansi memiliki nilai t hitung sebesar 2,026 > nilai tabel t sebesar 2,008 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df=n-k$ , yaitu  $54-4=50$ ) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,300 dan tingkat signifikansi 0,048 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_2$  diterima dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

### 3. Pengujian Hipotesis ( $H_3$ )

Sistem pelaporan memiliki nilai t hitung sebesar 3,397 > nilai tabel t sebesar 2,008 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df=n-k$ , yaitu  $54-4=50$ ) dengan unstandardized coefficients beta sebesar 0,408 dan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_3$  diterima dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan) terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) secara bersama-sama, dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat signifikan < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 15 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	282,655	3	94,218	27,758	,000 <sup>b</sup>
	Residual	169,715	50	3,394		
	Total	452,370	53			

Sumber: Data primer diolah, 2021

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengukur kebenaran hubungan dari model yang dipakai yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians dari variabel independent yang menerangkan variabel dependent.

Tabel 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790 <sup>a</sup>	,625	,602	1,84236

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan

Sumber: Data primer diolah, 2021

### Pembahasan

#### Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti bahwa semakin jelasnya sasaran anggaran dalam mengelola sebuah anggaran sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) adalah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Hal ini berarti bahwa penerapan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur yang digunakan untuk menjamin akurasi dalam fungsi penyimpanan catatan (transaksi keuangan) tujuannya adalah untuk membuat sumber data tertentu di tempatkan pada sistem yang baik dan benar.

#### **Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) adalah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti semakin tingginya tingkat sistem pelaporan berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal ini berarti bahwa sistem pelaporan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

#### **Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah**

Hipotesis ketiga ( $H_4$ ) adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dan dapat dilihat secara signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji F dari ketiga variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **KESIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI**

#### **Kesimpulan**

Kejelasan Sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Sistem Pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

### **Implikasi**

Jelasnya sasaran anggaran, maka semakin besar pula tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin baik tingkat pengendalian akuntansi, maka akan semakin besar pula tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem pelaporan yang baik akan mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik pula

### **Saran**

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, penyajian laporan keuangan, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi disiplin kerja dan partisipasi anggaran serta dapat menambah sampel untuk memperluas wilayah penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bengkulu. Bagi pemerintah daerah, khususnya di BPKAD Pemerintah Kota Bengkulu dalam membuat perencanaan anggaran agar lebih meningkatkan sistem pelaporan agar akuntabilitas kinerja pemerintah dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

### **Referensi**

- (LAN), L. a., & pembangunan, B. p. ((BPKP.2000). *Mengemukakan laporan yang baik*.
- 2008, P. P. (n.d.). *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- 2014, P. P. (n.d.). *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Auditya, L., & Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Vol. III*, 21-41.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- BPKP. (2011). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor.
- Emilia, Nur, R., Abdillah, W., & Abdullah. (2013). Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 3 (3).
- Hidayatullah, A., & Herdjiono, I. (2015 ). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. .  
Prosiding. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
- Indonesia, R. (2003). *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Kusumaningrum, & indraswati. (2010). Pengaruh keejelasan sasaran anggaran, penegendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah. *Tesis Universitas diponegoro*.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Negara-LAN, L. A. (2003). *Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Paramitha, Dwiki, I. A., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(3), 2457-2479.
- Ramandei, & Pilipus. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kota Jayapura. *Thesis*.
- Reni, Y., Haridi, & Rusli. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom Fekom*, 1 (2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Zakiyudin, Ali, & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 89.